

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI
(BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI
BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

MARDIANA LUVITASARI
B200 140 219

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI
(BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI
BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MARDIANA LUVITASARI
B200 140 219

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin.,Akt. M.Si)
NIK/NIDN : 523 / 0609016002

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI
(BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI
BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017
(Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)**

Oleh:

MARDIANA LUVITASARI
B 200140219

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari : Rabu, 31 Januari 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Drs. Atwal Arifin., Akt., M.Si
(Ketua Dewan Penguji)
2. Andy Dwi Bayu Buwono, SE., M.Si.Ph.D
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dr. Zulfikar, SE., M.Si
(Anggota 2 Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Dr. Syamsudin, MM
NIDN. 017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat tertulis orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis



MARDIANA LUVITASARI
B200 140 219

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD),
ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
(BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI BELANJA
DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017**
(Studi Empiris di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Jumlah Murid paud terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa se-kabupaten Wonogiri berjumlah 251 desa. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Diperoleh sampel 200 desa yang dianalisis dengan metode regresi linier berganda program IBM SPSS 21.00. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,032 atau 3,2%. Hal ini berarti bahwa variasi variable Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan dapat dijelaskan oleh variable PADesa, DD, ADD, BHPR, dan JML_ANK_PA (Jumlah Murid Paud), sedangkan sisanya 96,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji PADesa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Sedangkan DD, ADD, BHPR, dan Jumlah Murid Paud tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Kata kunci: *Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Jumlah Sawah dan Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.*

Abstract

The purpose of this research is to know the influence of Village Original Income (PADesa), Village Fund (DD), Village Fund Allocation (ADD), Profit Sharing (BHPR) and Number of Pid Students to Village Education Expenditure Allocation in Wonogiri Regency. The population used in this study is the whole village as Wonogiri district amounted to 251 villages. The sample in this study using purposive sampling method in accordance with the criteria specified. A sample of 200 villages were analyzed using multiple linear regression method of IBM SPSS 21.00 program. The results of this study indicate that the coefficient of determination obtained value of 0.032 or 3.2%. This means that variations in the variables of the Allocation of Village Expenditure on the Field of Education can be explained by the variables of PADesa, DD, ADD, BHPR, and JML_ANK_PA (Number of Paud Students), while the remaining 96.8% is explained by other factors outside the model under study. PADesa test results have a positive and significant impact on Education Expenditure Village Allocation. While DD, ADD, BHPR, and Number of Paud students no significant effect on Education Expenditure Village Allocation.

Keyword: *Village Local Revenue (PADesa), Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD), Profit Sharing Tax and Retribution (BHPR), and Number of Pid Students and Village Education Expenditure Expenditures in Allocation*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah Negara di bangun dari desa-desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa juga merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Desa mempunyai berbagai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk membangun desa agar menjadi desa yang maju dan meningkat kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pembangunan ini dapat melakukan pemerataan pembangunan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di seluruh Indonesia, baik ditingkat pusat, daerah, kabupaten maupun desa dan pelosok-pelosok desa. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap minim oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak ter pikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit atau tegas.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peratiran desa yang memuat pertanggungjawaban dari pemegang tanggungjawab desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas tiga bagian yaitu berisi tentang Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. Rancangan APBDes dibahas pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat 1 disebutkan bahwa PADes bersumber dari : Pendapatan Hasil Usaha Desa, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aset milik Desa, Hasil Swadaya dan juga Partisipasi

Masyarakat, Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah / desa, maupun transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berupa bagi hasil pajak bumi dan bangunan, serta Pendapatan Asli Desa Lain-lain yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana DD tersebut langsung turun ke desa tidak melalui prantara. Alokasi DD sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berdeda-beda. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian DD dengan berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan.

Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. ADD nantinya diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), pemberdayaan masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasikan BHPR kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.

Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan bidang Pendidikan desa dan jumlah murid desa mempunyai peran untuk mendukung Pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Habibah Ummu pada tahun 2017. Perbedaannya adalah penelitian ini

menambahkan variable independen yaitu Jumlah Murid Paud. Sehingga berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis ingin membuat judul penelitian yaitu “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), DANA DESA (DD), ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI (BHPR), DAN JUMLAH MURID PAUD TERHADAP ALOKASI BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa se-Kabupaten Wonogiri)”.

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 251 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut:

- 1) Desa-desa yang terletak di Kabupaten Wonogiri
- 2) Desa-desa yang telah mengumpulkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Januari sampai bulan Juli 2017.

2.2 Data, sumber data, dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang bersangkutan. Dokumen data yang telah ada diperoleh langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri dengan menggunakan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri. Pada penelitian ini metode pengumpulan yang digunakan peneliti adalah dokumentasi.

2.3 Definisi dan Operasional Variabel

2.3.1 Variabel Dependen

Dalam upaya menunjang pelayanan dasar khususnya pendidikan Desa juga memberikan peran aktif melalui alokasi anggaran bidang pendidikan pada APBDesa-nya, khususnya untuk menunjang program pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Menurut Permendes No. 21 Tahun 2015 yang telah disahkan pada akhir 2015 tentang prioritas DD tahun 2016. Secara umum prioritas

penggunaan DD ditunjukkan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam meningkatkan pembangunan desa salah satunya menyebutkan dalam bidang pendidikan. Dimana desa mempunyai peran dalam mendukung pendidikan di Wonogiri.

2.3.2 Variabel independen

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, PADesa yaitu berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa.

2) Dana Desa (DD)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Dana Desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari anggaran dan belanja negara di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk desa. Sumber ADD ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa sebagian dari anggaran sendiri untuk dana rangsangan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di desa.

4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR)

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, bagi hasil yang merupakan komponen sumber dari pendapatan desa disini yaitu, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah. Misalnya: bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

5) Jumlah Murid Paud (JMP)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting untuk membangun karakter anak sejak dini. Upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.

2.4 Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen dengan skala pengukuran yang bersifat metrik (interval atau rasio) untuk kedua variabel tersebut (Ghozali, 2012:7). Uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dan Jumlah Murid Paud terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, dimana dirumusnya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1PADesa + b_2DD + b_3ADD + b_4BHPR + b_5JMP + e$$

Keterangan :

Y = Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan

PADesa = Pendapatan Asli Desa

DD = Dana Desa

ADD = Alokasi Dana Desa

BHPR = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

JMP = Jumlah Murid Paud

a = Konstanta Regresi

e = Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Normalitas

Pada penelitian ini sampelnya ada 200 desa, sehingga dengan model *Central Limit Theorem* (CLT) menyatakan jika sample yang diuji diatas atau sama dengan 30 ($n \geq 30$) maka distribusi sample tersebut dianggap mengikuti normal. Jadi, dalam model CLT mayoritas ahli statistika menganggap sampel sejumlah 30 atau lebih sudah cukup besar untuk diasumsikan mendekati distribusi normal (Lind, 2014: 300-301)

3.1.2 Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas dapat ditunjukkan dengan nilai *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* dari tiap-tiap variabel independen. Jika nilai *tolerance value* lebih besar dari 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat dinyatakan bebas dari uji multikolonieritas (Ghozali, 2012: 105-106).

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2012) kriteria pengujian Glejser adalah jika *probability value* < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas dan jika *probability value* > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel independen nilai *probability value* > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen bebas dari heteroskedastisitas.

3.2 Uji Hipotesis

3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 dalam analisis regresi linier berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,032. Hal ini berarti bahwa 3,2% variasi variabel alokasi belanja desa bidang pendidikan dapat dijelaskan oleh PADesa, DD, ADD, BHPR, dan Jumlah Murid Paud sedangkan sisanya 96,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

3.2.2 Uji F

Hasil Uji F diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $2,328 > 2,260$ dan nilai signifikansi = $0,044 < \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan model regresi dinyatakan fit. Artinya bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yang terdiri atas PADesa, DD, ADD, BHPR dan Jumlah Murid Paud secara keseluruhan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

3.2.3 Uji t

Dari hasil pengujian sebagai berikut :

(1) Dapat diketahui bahwa PADes memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 2,797 lebih besar dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111.

Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel PADes berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Pertama (H_1) diterima. (2) Dapat diketahui bahwa DD memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu $0,777 > 0,05$ dan T_{hitung} sebesar 0,284 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111. Hal ini berarti menunjukkan secara parsial variabel DD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Kedua (H_2) ditolak. (3) Dapat diketahui bahwa ADD memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,673 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar -0,422 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111. Hal ini berarti menunjukkan variabel ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Ketiga (H_3) ditolak. (4) Dapat diketahui bahwa BHPR memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,664 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar -0.435 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111. Hal ini berarti menunjukkan variabel BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Keempat (H_4) ditolak. (5) Dapat diketahui bahwa Jumlah Murid Paud memiliki nilai lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,097 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 1,669 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111. Hal ini berarti menunjukkan variabel JMP tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan, maka Hipotesis Kelima (H_5) ditolak.

3.3 Pembahasan Hasil Analisis

3.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa PADes memiliki nilai signifikansi lebih dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 2,797 lebih besar dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1.971111. Hal ini menunjukkan variabel PADes berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H_1) diterima. Menurut Undang-

Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1, PADesa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan skala local desa. Yang dimaksud ‘hasil usaha’ termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah Bangkok. Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Semakin besar PADesa maka akan semakin besar pula peningkatan alokasi belanja desa bidang pendidikan di kabupaten Wonogiri, karena PADesa yang tinggi maka desa dapat memenuhi kebutuhan belanja sendiri. Pemerintah desa juga akan mengali potensi yang dimiliki tiap desa untuk menghasilkan PADesa yang tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibah Ummu (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa(ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

3.3.2 Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa DD memiliki nilai signifikasi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu $0,777 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 0,284 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1,971111. Hal ini menunjukkan variabel DD tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesisi Kedua (H_2) ditolak. Pemerintah pusat memberikan DD secara umum prioritas penggunaan DD ditunjukan pada dua bidang yaitu bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam era sekarang ini, sebagian besar pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur khususnya jalan, irigasi dan jembatan. Sehingga dimungkinkan aliran DD tersebut belum banyak digunakan untuk alokasi bidang pendidikan. Alokasi belanja desa bidang pendidikan di Wonogiri lebih banyak diambil dari PADesa, terutama untuk PAUD dengan nilai alokasi yang relative besar, karena PAUD real milik desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh William Gani dan Septian Bayu Kristanto (2013) dalam

penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatra”.

3.3.3 Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa ADD memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,673 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $-0,422$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar $1,971111$. Hal ini menunjukkan variabel ADD tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Ketiga (H_3) ditolak. ADD bersumber dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa. ADD juga sebagai penghasilan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa juga dibagi atas anggaran sendiri untuk dana membangkitkan pembangunan desa. Saat ini, dikarenakan penerapan awal UU Desa, pemerintah desa lebih terfokus untuk mengalokasikan dananya untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana, dan penghasilan tetap berupa gaji kepala desa dll, maka belum banyak dipikirkan oleh pemerintah daerah, sehingga alokasi untuk belanja desa bidang pendidikan belum banyak teralokasikan di kabupaten Wonogiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2015) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Di Sulawesi Selatan”. Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan.

3.3.4 Pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa BHPR memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,664 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar $-0,435$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar $1,971111$. Hal ini berarti menunjukkan variabel BHPR tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Keempat (H_4) ditolak. Proporsi alokasi Bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) di Kabupaten Wonogiri dalam APBDesa saat

ini tidak menggunakan kriteria besaran di tiap desa akan tetapi menggunakan metode rata-rata pendapatannya, sehingga variabel BHPR ini tidak begitu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Hal ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Wulandari (2014) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”.

3.3.5 Pengaruh Jumlah Murid Paud Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan.

Berdasarkan tabel uji t dapat diketahui bahwa JMP memiliki nilai signifikansi lebih besar dibandingkan *level of significant* yaitu sebesar $0,097 > 0,05$ dan nilai T_{hitung} sebesar 1.669 lebih kecil dibandingkan dengan nilai T_{tabel} sebesar 1,971111. Hal ini menunjukkan variabel JMP tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pendidikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Keempat (H_5) ditolak. Tingkat alokasi belanja desa bidang pendidikan tidak berpengaruh karena pengalokasiannya tidak berdasarkan jumlah anak paud di kabupaten Wonogiri.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian secara menunjukkan bahwa variabel PADesa berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja desa bidang pendidikan.
- 2) Sedangkan DD, ADD, BHPR dan Jumlah Murid Paud tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, dan Abdul Halim. 2003. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Dan Bali*”. Simposium Nasional Akuntansi VI.
- Eko, Sutoro. 2015. “*Desa Membangun Indonesia*”. Yogyakarta.
- Febriadmadja, Henariza. 2014. “*Praktik Sosial Dalam Alokasi Dana Desa Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wonorejo*

- Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang)*". Jurnal Universitas Brawijaya Malang.
- Gani, William, dan Septian Bayu Kristianto. 2013. "*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada kabupaten/Kota Pulau Sumatra*". Jurnal InFestasi: Vol.9 No.2 Hal. 115-122.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Habibah, Ummu. 2017. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo)". Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <http://jateng.bps.go.id//> , diakses pada tanggal 14 November 2017.
- Lind, Marchal, and Wathen. 2014. "*Statistical Techniques In Business and Economics*". Jakarta: Salemba Empat. Edisi 15.
- Nur, Muhammad. 2015. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan*". ASSETS, Vol. 5. No. 1. Hal: 78-88.
- Nurcholis, Hanif. 2011. "*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*". Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2015
- Permendagri No. 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendes No 01 Tahun 2015, tentang Ruang Lingkup Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa.
- Permendes No. 21 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 72 Tahun 2005, tentang Pemerintah Desa.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Wulandari, Yolanda. 2014. "*Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Indonesia*." Jurnal Akuntansi 2.1.
- Yuliana, Ratna. 2015. "*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jentang Sekolah Menengah Di Kabupaten Sukoharjo*". Universitas Diponegoro Semarang.